

## MATRIKS PERBANDINGAN

**Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan**

**Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja**

<b>Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja</b>	<b>Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja</b>
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:	Menimbang:
bahwa untuk menjalankan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;	a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional, perlu menyesuaikan gaji Pegawai Pemerintah dengan Pedanjian Kerja; b. bahwa besaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja perlu diubah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Peraturan Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
Mengingat:	Mengingat:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264)	1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264); 3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);

<p align="center"><b>Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja</b></p>	<p align="center"><b>Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja</b></p>
<p align="center">MEMUTUSKAN:</p>	<p align="center">MEMUTUSKAN:</p>
<p>Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.</p>	<p>Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 98 TAHUN 2020 TENTANG GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.</p>
	<p align="center">Pasal I</p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengubah Lampiran Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218), sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.</li> <li>2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.</li> </ol>
<p align="center">Pasal 1</p>	<p align="center">Pasal 1</p>
<p>Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas jabatan pemerintahan.</li> <li>2. Gaji PPPK yang selanjutnya disebut Gaji adalah imbalan dalam bentuk uang yang wajib dibayarkan oleh pemerintah secara adil dan layak kepada PPPK sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaan.</li> <li>3. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>4. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah.</li> <li>5. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.</li> </ol>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center"><b>Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja</b></p>	<p align="center"><b>Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja</b></p>
<p>6. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.</p>	
<p align="center">Pasal 2</p>	<p align="center">Pasal 2</p>
<p>(1) PPPK diangkat dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) PPPK yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Gaji yang besarnya didasarkan golongan dan masa kerja golongan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.</p> <p>(3) Besaran Gaji PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran Gaji sebelum dikenakan pemotongan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 3</p>	<p align="center">Pasal 3</p>
<p>(1) PPPK dapat diberikan kenaikan Gaji berkala atau kenaikan Gaji istimewa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Besaran kenaikan Gaji berkala atau kenaikan Gaji istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.</p> <p>(3) Ketentuan kenaikan Gaji berkala atau kenaikan Gaji istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 4</p>	<p align="center">Pasal 4</p>
<p>(1) PPPK yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan tunjangan sesuai dengan tunjangan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah tempat PPPK bekerja.</p> <p>(2) Tunjangan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tunjangan keluarga;</li> <li>b. tunjangan pangan;</li> <li>c. tunjangan jabatan struktural;</li> </ol>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center"><b>Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja</b></p>	<p align="center"><b>Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja</b></p>
<p>d. tunjangan jabatan fungsional; atau e. tunjangan lainnya. (3) Besaran Tunjangan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tunjangan sebagaimana yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.</p>	
<p align="center">Pasal 5</p>	<p align="center">Pasal 5</p>
<p>(1) Gaji dan Tunjangan bagi PPPK yang bekerja di Instansi Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2) Gaji dan Tunjangan bagi PPPK yang bekerja di Instansi Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 6</p>	<p align="center">Pasal 6</p>
<p>Gaji dan Tunjangan yang diterima PPPK dikenakan pemotongan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan dan tidak ditanggung oleh pemerintah.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 7</p>	<p align="center">Pasal 7</p>
<p>(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian Gaji dan Tunjangan PPPK yang bekerja pada Instansi Pusat diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian Gaji dan Tunjangan PPPK yang bekerja pada Instansi Daerah diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 8</p>	<p align="center">Pasal 8</p>
<p>Peraturan Presiden ini berlaku sampai dengan diberlakukannya ketentuan mengenai gaji dan tunjangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 9</p>	<p align="center">Pasal II</p>
<p>Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p>Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>

<p align="center"><b>Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja</b></p>	<p align="center"><b>Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja</b></p>
<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>
<p align="center">Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2020</p> <p align="center">PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO</p>	<p align="center">Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2024</p> <p align="center">PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO</p>
<p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 September 2020</p> <p align="center">MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY</p>	<p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2024</p> <p align="center">MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. PRATIKNO</p>
<p>LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 218</p>	<p>LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 24</p>
<p align="center">Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan, ttd. Lydia Silvanna Djaman</p>	<p align="center">Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, ttd. Lydia Silvanna Djaman</p>

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja				
LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98 TAHUN 2020 TENTANG GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA					LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 98 TAHUN 2020 TENTANG GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA				
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA					PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA				
DAFTAR GAJI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA					DAFTAR GAJI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA				
MKG	GOLONGAN				MKG	GOLONGAN			
	I	II	III	IV		I	II	III	IV
0	1.794.900				0	<u>1.938.500</u>			
1					1				
2	1.851.600				2	<u>1.999.500</u>			
3		1.960.200	2.043.200	2.129.500	3		<u>2.116.900</u>	<u>2.206.500</u>	<u>2.299.800</u>
4	1.909.900				4	<u>2.062.500</u>			
5		2.021.900	2.107.600	2.196.700	5		<u>2.183.600</u>	<u>2.276.000</u>	<u>2.372.300</u>
6	1.970.000				6	<u>2.127.500</u>			
7		2.085.700	2.173.900	2.265.900	7		<u>2.252.400</u>	<u>2.347.700</u>	<u>2.447.000</u>
8	2.032.100				8	<u>2.194.500</u>			
9		2.151.400	2.242.300	2.337.200	9		<u>2.323.300</u>	<u>2.421.600</u>	<u>2.524.000</u>
10	2.096.100				10	<u>2.263.600</u>			
11		2.219.100	2.313.000	2.410.800	11		<u>2.396.500</u>	<u>2.497.900</u>	<u>2.603.500</u>
12	2.162.000				12	<u>2.334.900</u>			
13		2.289.000	2.385.800	2.486.700	13		<u>2.472.000</u>	<u>2.576.500</u>	<u>2.685.500</u>
14	2.230.100				14	<u>2.408.400</u>			
15		2.361.100	2.461.000	2.565.100	15		<u>2.549.800</u>	<u>2.657.700</u>	<u>2.770.100</u>
16	2.300.400				16	<u>2.484.300</u>			

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja				
17		2.435.400	2.538.500	2.645.900	17		<u>2.630.100</u>	<u>2.741.400</u>	<u>2.857.400</u>
18	2.372.800				18	<u>2.562.500</u>			
19		2.512.200	2.618.500	2.729.200	19		<u>2.713.000</u>	<u>2.827.700</u>	<u>2.947.400</u>
20	2.447.600				20	<u>2.643.200</u>			
21		2.591.300	2.700.900	2.815.200	21		<u>2.798.400</u>	<u>2.916.800</u>	<u>3.040.200</u>
22	2.524.600				22	<u>2.726.500</u>			
23		2.672.900	2.785.900	2.903.800	23		<u>2.886.600</u>	<u>3.008.700</u>	<u>3.135.900</u>
24	2.604.200				24	<u>2.812.400</u>			
25		2.757.100	2.873.700	2.995.200	25		<u>2.977.500</u>	<u>3.103.400</u>	<u>3.234.700</u>
26	2.686.200				26	<u>2.900.900</u>			
27		2.843.900	2.964.200	3.089.600	27		<u>3.071.200</u>	<u>3.201.200</u>	<u>3.336.600</u>

MKG	GOLONGAN				MKG	GOLONGAN			
	V	VI	VII	VIII		V	VI	VII	VIII
0	2.325.600				0	<u>2.511.500</u>			
1	2.362.200				1	<u>2.551.100</u>			
2					2				
3	2.436.600	2.539.700	2.647.200	2.759.100	3	<u>2.631.400</u>	<u>2.742.800</u>	<u>2.858.800</u>	<u>2.979.700</u>
4					4				
5	2.513.400	2.619.700	2.730.500	2.846.100	5	<u>2.714.300</u>	<u>2.829.100</u>	<u>2.948.800</u>	<u>3.073.500</u>
6					6				
7	2.592.500	2.702.300	2.816.500	2.935.700	7	<u>2.799.800</u>	<u>2.918.200</u>	<u>3.041.700</u>	<u>3.170.300</u>
8					8				
9	2.674.200	2.787.300	2.905.200	3.028.200	9	<u>2.888.000</u>	<u>3.010.100</u>	<u>3.137.500</u>	<u>3.270.200</u>
10					10				
11	2.758.400	2.875.200	2.996.800	3.123.400	11	<u>2.978.900</u>	<u>3.105.000</u>	<u>3.236.300</u>	<u>3.373.200</u>
12					12				
13	2.845.300	2.965.600	3.091.100	3.221.800	13	<u>3.072.800</u>	<u>3.202.700</u>	<u>3.338.200</u>	<u>3.479.400</u>
14					14				
15	2.935.000	3.059.100	3.188.500	3.323.400	15	<u>3.169.500</u>	<u>3.303.600</u>	<u>3.443.400</u>	<u>3.589.000</u>

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja				
16					16				
17	3.027.300	3.155.400	3.288.900	3.428.000	17	<u>3.269.400</u>	<u>3.407.700</u>	<u>3.551.800</u>	<u>3.702.000</u>
18					18				
19	3.122.700	3.254.800	3.392.500	3.535.900	19	<u>3.372.300</u>	<u>3.515.000</u>	<u>3.663.700</u>	<u>3.818.600</u>
20					20				
21	3.221.000	3.357.300	3.499.300	3.647.400	21	<u>3.478.500</u>	<u>3.625.700</u>	<u>3.779.100</u>	<u>3.938.900</u>
22					22				
23	3.322.500	3.463.000	3.609.600	3.762.200	23	<u>3.588.100</u>	<u>3.739.900</u>	<u>3.898.100</u>	<u>4.063.000</u>
24					24				
25	3.427.100	3.572.100	3.723.200	3.880.700	25	<u>3.701.100</u>	<u>3.857.700</u>	<u>4.020.800</u>	<u>4.190.900</u>
26					26				
27	3.535.100	3.684.600	3.840.400	4.003.000	27	<u>3.817.700</u>	<u>3.979.200</u>	<u>4.147.500</u>	<u>4.322.900</u>
28					28				
29	3.646.400	3.800.700	3.961.400	4.129.000	29	<u>3.937.900</u>	<u>4.104.500</u>	<u>4.278.100</u>	<u>4.459.100</u>
30					30				
31	3.761.200	3.920.400	4.086.200	4.259.100	31	<u>4.061.900</u>	<u>4.233.800</u>	<u>4.412.800</u>	<u>4.599.500</u>
32					32				
33	3.879.700	4.043.800	4.214.900	4.393.100	33	<u>4.189.900</u>	<u>4.367.100</u>	<u>4.551.800</u>	<u>4.744.400</u>
MKG	GOLONGAN				MKG	GOLONGAN			
	IX	X	XI	XII		IX	X	XI	XII
0	2.966.500	3.091.900	3.222.700	3.359.000	0	<u>3.203.600</u>	<u>3.339.100</u>	<u>3.480.300</u>	<u>3.627.500</u>
1					1				
2	3.059.800	3.189.200	3.324.100	3.464.800	2	<u>3.304.400</u>	<u>3.444.200</u>	<u>3.589.900</u>	<u>3.741.800</u>
3					3				
4	3.156.200	3.289.700	3.429.000	3.574.000	4	<u>3.408.500</u>	<u>3.552.700</u>	<u>3.703.000</u>	<u>3.859.600</u>
5					5				
6	3.255.700	3.393.300	3.536.900	3.686.500	6	<u>3.515.900</u>	<u>3.664.600</u>	<u>3.819.600</u>	<u>3.981.200</u>
7					7				
8	3.358.200	3.500.200	3.648.200	3.802.500	8	<u>3.626.600</u>	<u>3.780.000</u>	<u>3.939.900</u>	<u>4.106.600</u>



Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja								
9					9								
10	3.464.000	3.610.400	3.763.200	3.922.300	10	<u>3.740.800</u>	<u>3.899.100</u>	<u>4.064.000</u>	<u>4.235.900</u>				
11					11								
12	3.573.000	3.724.200	3.881.200	4.045.800	12	<u>3.858.600</u>	<u>4.021.900</u>	<u>4.192.000</u>	<u>4.369.300</u>				
13					13								
14	3.685.500	3.841.400	4.003.900	4.173.400	14	<u>3.980.200</u>	<u>4.148.500</u>	<u>4.324.000</u>	<u>4.506.900</u>				
15					15								
16	3.801.600	3.962.400	4.130.000	4.304.700	16	<u>4.105.500</u>	<u>4.279.200</u>	<u>4.460.200</u>	<u>4.648.900</u>				
17					17								
18	3.921.300	4.087.300	4.260.200	4.440.300	18	<u>4.234.800</u>	<u>4.414.000</u>	<u>4.600.700</u>	<u>4.795.300</u>				
19					19								
20	4.044.900	4.216.000	4.394.300	4.580.200	20	<u>4.368.200</u>	<u>4.553.000</u>	<u>4.745.600</u>	<u>4.946.300</u>				
21					21								
22	4.172.300	3.348.700	4.532.700	4.724.500	22	<u>4.505.800</u>	<u>4.696.400</u>	<u>4.895.000</u>	<u>5.102.100</u>				
23					23								
24	4.303.700	4.485.700	4.675.400	4.873.200	24	<u>4.647.700</u>	<u>4.844.300</u>	<u>5.049.200</u>	<u>5.262.800</u>				
25					25								
26	4.439.200	4.627.000	4.822.700	5.026.700	26	<u>4.794.100</u>	<u>4.996.900</u>	<u>5.208.200</u>	<u>5.428.500</u>				
27					27								
28	4.579.000	4.772.800	4.974.500	5.185.000	28	<u>4.945.100</u>	<u>5.154.200</u>	<u>5.372.300</u>	<u>5.599.500</u>				
29					29								
30	4.723.300	4.923.000	5.131.300	5.348.400	30	<u>5.100.800</u>	<u>5.316.600</u>	<u>5.541.500</u>	<u>5.775.900</u>				
31					31								
32	4.872.000	5.078.000	5.292.800	5.516.800	32	<u>5.261.500</u>	<u>5.484.000</u>	<u>5.716.000</u>	<u>5.957.800</u>				
MKG	GOLONGAN					MKG	GOLONGAN						
	XIII	XIV	XV	XVI	XVII		XIII	XIV	XV	XVI	XVII		
	0	3.501.100	3.649.200	3.803.500	3.964.500		4.132.200	0	<u>3.781.000</u>	<u>3.940.900</u>	<u>4.107.600</u>	<u>4.281.400</u>	<u>4.462.500</u>
	1							1					
2	3.611.400	3.764.100	3.923.300	4.089.300	4.262.200	2	<u>3.900.000</u>	<u>4.065.000</u>	<u>4.237.000</u>	<u>4.416.200</u>	<u>4.603.000</u>		

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja						Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					
3						3					
4	3.725.100	3.882.700	4.046.900	4.218.000	4.396.500	4	<u>4.022.900</u>	<u>4.193.000</u>	<u>4.370.400</u>	<u>4.555.300</u>	<u>4.748.000</u>
5						5					
6	3.842.400	4.004.900	4.174.300	4.351.000	4.535.000	6	<u>4.149.600</u>	<u>4.325.100</u>	<u>4.508.100</u>	<u>4.698.700</u>	<u>4.897.500</u>
7						7					
8	3.963.500	4.131.100	4.305.800	4.487.900	4.677.800	8	<u>4.280.300</u>	<u>4.461.300</u>	<u>4.650.000</u>	<u>4.846.700</u>	<u>5.051.800</u>
9						9					
10	4.088.200	4.261.100	4.441.400	4.629.300	4.825.200	10	<u>4.415.100</u>	<u>4.601.800</u>	<u>4.796.500</u>	<u>4.999.400</u>	<u>5.210.900</u>
11						11					
12	4.217.100	4.395.400	4.581.400	4.775.200	4.977.100	12	<u>4.554.100</u>	<u>4.746.800</u>	<u>4.947.600</u>	<u>5.156.800</u>	<u>5.375.000</u>
13						13					
14	4.349.900	4.533.800	4.725.700	4.925.500	5.133.800	14	<u>4.697.600</u>	<u>4.896.300</u>	<u>5.103.400</u>	<u>5.319.300</u>	<u>5.544.300</u>
15						15					
16	4.486.800	4.676.600	4.874.400	5.080.700	5.295.600	16	<u>4.845.500</u>	<u>5.050.500</u>	<u>5.264.100</u>	<u>5.486.800</u>	<u>5.718.900</u>
17						17					
18	4.628.100	4.824.000	5.028.000	5.240.700	5.462.400	18	<u>4.998.100</u>	<u>5.209.500</u>	<u>5.429.900</u>	<u>5.659.600</u>	<u>5.899.000</u>
19						19					
20	4.774.000	4.975.900	5.186.300	5.405.700	5.634.300	20	<u>5.155.500</u>	<u>5.373.600</u>	<u>5.600.900</u>	<u>5.837.800</u>	<u>6.084.800</u>
21						21					
22	4.924.300	5.132.600	5.349.700	5.576.000	5.811.800	22	<u>5.317.900</u>	<u>5.542.900</u>	<u>5.777.300</u>	<u>6.021.700</u>	<u>6.276.400</u>
23						23					
24	5.079.300	5.294.200	5.518.100	5.751.600	5.994.900	24	<u>5.485.400</u>	<u>5.717.400</u>	<u>5.959.300</u>	<u>6.211.400</u>	<u>6.474.100</u>
25						25					
26	5.239.300	5.460.900	5.691.900	5.932.700	6.183.700	26	<u>5.658.200</u>	<u>5.897.500</u>	<u>6.147.000</u>	<u>6.407.000</u>	<u>6.678.000</u>
27						27					
28	5.404.400	5.633.000	5.871.200	6.119.600	6.378.400	28	<u>5.836.400</u>	<u>6.083.200</u>	<u>6.340.600</u>	<u>6.608.800</u>	<u>6.888.300</u>
29						29					
30	5.574.500	5.810.400	6.056.100	6.312.300	6.579.300	30	<u>6.020.200</u>	<u>6.274.800</u>	<u>6.540.300</u>	<u>6.816.900</u>	<u>7.105.300</u>
31						31					
32	5.750.100	5.993.300	6.246.900	6.511.100	6.786.500	32	<u>6.209.800</u>	<u>6.472.500</u>	<u>6.746.200</u>	<u>7.031.600</u>	<u>7.329.000</u>

<p align="center"><b>Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja</b></p>	<p align="center"><b>Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja</b></p>
<p align="center">PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO</p>	<p align="center">PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO</p>
<p align="center">Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan, ttd. Lydia Silvanna Djaman</p>	<p align="center">Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, ttd. Lydia Silvanna Djaman</p>